



**BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
BIRO FASILITASI PIMPINAN, HUBUNGAN MASYARAKAT,
DAN ADMINISTRASI**

Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta 10110 Telepon (021) 3505200

Situs Web: <https://bpip.go.id> Alamat Surel: persuratan@bpip.go.id

**LAPORAN KEGIATAN
FORUM KOMUNIKASI PUBLIK TAHUN 2026
“STRATEGI BANGUN NARASI, KUATKAN REPUTASI NEGERI”
18 S.D. 21 MEI 2026
KOTA BATAM, KEPULAUAN RIAU**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Republik Indonesia terus berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, transparan, dan akuntabel sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan pembangunan nasional. Komitmen tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan nasional yang berkelanjutan, serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, komunikasi publik memegang peranan yang sangat strategis karena menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat dalam menyampaikan kebijakan, program, capaian pembangunan, maupun berbagai informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Komunikasi publik saat ini tidak lagi dipandang hanya sebagai sarana penyampaian informasi satu arah, melainkan telah berkembang menjadi instrumen penting dalam membangun partisipasi masyarakat, memperkuat legitimasi kebijakan, membentuk persepsi publik, serta menjaga stabilitas sosial di tengah dinamika perkembangan informasi yang semakin cepat. Pemerintah dituntut mampu menghadirkan komunikasi yang terbuka, informatif, edukatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Di era transformasi digital, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berlangsung sangat cepat dan membawa perubahan besar terhadap pola interaksi sosial masyarakat. Masyarakat kini dapat memperoleh dan menyebarkan informasi secara instan melalui berbagai platform digital seperti media sosial, portal berita daring, aplikasi percakapan, hingga kanal video digital. Perubahan tersebut memberikan peluang besar dalam memperluas jangkauan komunikasi pemerintah, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan yang semakin kompleks.

Arus informasi yang sangat cepat sering kali menyebabkan munculnya disinformasi, misinformasi, hoaks, manipulasi opini, hingga polarisasi informasi di ruang digital. Kondisi tersebut dapat memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintah dan berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah perlu memiliki strategi komunikasi publik yang terencana, terukur, cepat, akurat, dan mampu menjawab dinamika isu yang berkembang di masyarakat.

Selain itu, perkembangan ruang digital telah menciptakan perubahan besar terhadap pola konsumsi informasi masyarakat. Publik kini lebih menyukai informasi yang cepat, visual, interaktif, dan mudah dipahami. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk mampu menyesuaikan pola komunikasi dengan perkembangan zaman tanpa mengurangi substansi dan kualitas informasi yang disampaikan. Pemerintah perlu mengoptimalkan penggunaan media digital secara kreatif dan inovatif agar pesan-pesan kebijakan dapat diterima masyarakat secara efektif.

Dalam konteks tersebut, pengelolaan narasi publik menjadi sangat penting. Narasi publik yang kuat, konsisten, dan konstruktif dapat membangun optimisme masyarakat, memperkuat persatuan nasional, serta meningkatkan citra positif pemerintah dan bangsa. Sebaliknya, komunikasi yang tidak terkoordinasi dan tidak selaras berpotensi menimbulkan kebingungan informasi di tengah masyarakat.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai lembaga negara nonkementerian yang memiliki tugas melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan memiliki tanggung jawab strategis dalam membangun narasi kebangsaan dan memperkuat nilai-nilai Pancasila di ruang publik. Dalam menjalankan tugas tersebut, BPIP tidak hanya berperan dalam pembinaan ideologi secara substantif, tetapi juga dalam membangun komunikasi publik yang mampu memperkuat karakter kebangsaan dan semangat persatuan nasional.

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa perlu terus diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui pendekatan komunikasi yang adaptif dan relevan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, penguatan komunikasi publik berbasis nilai-nilai Pancasila menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga ketahanan ideologi bangsa di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi melalui Bagian Hubungan Masyarakat memiliki peran strategis dalam mengelola komunikasi kelembagaan BPIP. Fungsi kehumasan pemerintah saat ini mengalami transformasi yang sangat signifikan. Kehumasan tidak lagi hanya bertugas melakukan publikasi kegiatan, tetapi juga berfungsi sebagai pengelola reputasi lembaga, pengelola isu publik, penyusun strategi komunikasi, pengelola media digital, serta penghubung antara pemerintah dengan masyarakat.

Bagian Hubungan Masyarakat BPIP memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan hubungan masyarakat, monitoring dan analisis pemberitaan media, pengelolaan media center, pengelolaan media sosial dan media elektronik resmi BPIP, pelaksanaan

peliputan dan publikasi kegiatan pimpinan, serta pengelolaan pengaduan masyarakat. Seluruh fungsi tersebut membutuhkan penguatan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi lintas sektor, dan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi komunikasi.

Pengelolaan komunikasi publik yang efektif juga membutuhkan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, media massa, akademisi, praktisi komunikasi, komunitas digital, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut penting untuk memastikan keselarasan pesan komunikasi pemerintah sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak menimbulkan multitafsir maupun disinformasi.

Keselarasan narasi nasional menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan komunikasi publik pemerintah. Narasi yang dibangun secara bersama-sama dan terkoordinasi dapat memperkuat citra positif pemerintah, meningkatkan optimisme masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap berbagai program pembangunan nasional. Selain itu, penguatan narasi nasional juga penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Di sisi lain, tantangan komunikasi publik saat ini semakin kompleks seiring meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik. Masyarakat menuntut pemerintah untuk mampu menyampaikan informasi secara cepat, transparan, dan akurat. Pemerintah juga dituntut untuk mampu merespons isu-isu publik secara tepat dan profesional agar tidak berkembang menjadi krisis komunikasi yang dapat memengaruhi reputasi lembaga maupun pemerintah secara keseluruhan.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan penguatan kapasitas komunikasi publik yang berkelanjutan melalui forum diskusi, pertukaran gagasan, berbagi praktik baik, dan pengembangan strategi komunikasi yang inovatif. Forum komunikasi publik menjadi salah satu sarana penting untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam membahas tantangan dan peluang komunikasi publik di era digital. Melalui forum tersebut, para peserta dapat saling bertukar pengalaman dan praktik baik terkait pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan media digital, strategi penanganan isu publik, penguatan reputasi lembaga, serta pengembangan narasi komunikasi yang konstruktif dan berbasis nilai-nilai kebangsaan. Selain itu, forum ini juga menjadi ruang kolaborasi untuk menyusun rekomendasi strategis dalam memperkuat komunikasi publik pemerintah secara nasional.

Berdasarkan hal tersebut, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menyelenggarakan Forum Komunikasi Publik Tahun 2026 dengan tema “Strategi Bangun Narasi, Kuatkan Reputasi Negeri” pada tanggal 18 s.d. 21 Mei 2026 di Kota Batam, Kepulauan Riau.

Pemilihan tema tersebut didasarkan pada pentingnya membangun narasi komunikasi publik yang strategis, terarah, dan konsisten dalam memperkuat reputasi bangsa di tengah dinamika perkembangan informasi global. Tema ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat kualitas komunikasi publik sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan nasional dan penguatan karakter kebangsaan.

Kegiatan Forum Komunikasi Publik Tahun 2026 dilaksanakan sebagai wadah strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinergi komunikasi publik antarinstansi pemerintah, memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi publik, meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan narasi digital, serta menyusun rekomendasi strategis dalam penguatan reputasi bangsa melalui komunikasi publik yang profesional dan berintegritas.

Forum ini diharapkan mampu menghasilkan berbagai gagasan, rekomendasi, dan strategi komunikasi yang dapat diterapkan dalam mendukung pengelolaan komunikasi publik pemerintah yang lebih adaptif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat jejaring dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung terciptanya komunikasi publik yang efektif dan berkelanjutan.

Melalui pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan tercipta peningkatan kapasitas aparatur pemerintah di bidang komunikasi publik, penguatan koordinasi komunikasi antar lembaga, peningkatan kualitas pengelolaan media digital pemerintah, serta terbangunnya keselarasan narasi nasional yang mampu memperkuat citra dan reputasi Indonesia di tingkat nasional maupun internasional.

Dengan demikian, Forum Komunikasi Publik Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam memperkuat pengelolaan komunikasi publik pemerintah yang profesional, kolaboratif, dan berbasis nilai-nilai Pancasila guna mendukung terciptanya masyarakat yang informatif, partisipatif, dan memiliki semangat kebangsaan yang kuat.

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung persiapan publikasi Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melalui Bagian Hubungan Masyarakat melaksanakan kegiatan Produksi dan Pengumpulan Footage Konten Pancasila pada tanggal 5 s.d. 8 Mei 2026 di Bandung, Jawa Barat.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan komunikasi publik kelembagaan melalui penyediaan materi visual dan audiovisual yang berkualitas, kreatif, dan relevan dengan perkembangan media digital saat ini. Produksi konten dilakukan untuk memenuhi kebutuhan publikasi pada berbagai kanal komunikasi BPIP, baik media sosial, media elektronik, media massa, maupun platform digital lainnya dalam rangka menyambut Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026.

Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada pengambilan footage yang menggambarkan semangat kebangsaan, keberagaman, gotong royong, persatuan, serta nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Selain sebagai kebutuhan publikasi, hasil footage juga diharapkan menjadi aset dokumentasi visual kelembagaan yang dapat

dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mendukung berbagai kebutuhan komunikasi publik BPIP.

B. DASAR HUKUM

Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik Tahun 2026 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pengelolaan komunikasi publik, serta pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dasar hukum tersebut menjadi pedoman dalam memastikan kegiatan dilaksanakan secara tertib, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menjadi landasan dalam pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengatur mekanisme perencanaan pembangunan nasional secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang mengatur pengelolaan dokumen dan arsip negara sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang tertib dan akuntabel.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, yang menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan nasional agar selaras dengan arah kebijakan pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, yang mengatur mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pemerintah agar berjalan efektif dan tepat sasaran.
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024, yang menegaskan pentingnya penguatan ideologi Pancasila, pembangunan karakter bangsa, serta penguatan komunikasi publik dalam mendukung pembangunan nasional.
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang menjadi dasar pembentukan dan pelaksanaan tugas BPIP dalam melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

8. Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020–2024, yang menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan BPIP dalam mendukung penguatan ideologi Pancasila dan pembangunan karakter bangsa.
9. Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP, yang mengatur struktur organisasi, tugas, dan fungsi unit kerja di lingkungan BPIP termasuk pelaksanaan fungsi hubungan masyarakat dan komunikasi publik.
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2026 Nomor DIPA-122.01.0/2026, yang menjadi dasar pelaksanaan anggaran kegiatan Forum Komunikasi Publik Tahun 2026.

Dasar hukum tersebut menjadi pijakan utama dalam penyelenggaraan Forum Komunikasi Publik Tahun 2026 agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, mendukung pencapaian sasaran strategis BPIP, serta memperkuat pengelolaan komunikasi publik pemerintah secara profesional, adaptif, dan berkelanjutan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Kegiatan Forum Komunikasi Publik Tahun 2026 dimaksudkan sebagai forum strategis dalam memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinergi komunikasi publik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, media massa, akademisi, praktisi komunikasi, komunitas digital, serta para pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pembangunan komunikasi publik nasional yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada penguatan reputasi bangsa.

Forum ini juga dimaksudkan sebagai ruang dialog dan pertukaran gagasan untuk membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya pengelolaan komunikasi publik yang profesional di tengah perkembangan teknologi informasi dan dinamika komunikasi digital yang semakin kompleks. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta keselarasan narasi nasional yang mampu mendukung penyampaian kebijakan pemerintah secara tepat, cepat, dan konstruktif kepada masyarakat.

Selain itu, kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi publik agar mampu menghadapi berbagai tantangan komunikasi di era digital, termasuk pengelolaan isu publik, penanganan disinformasi, penguatan media digital pemerintah, pengelolaan reputasi lembaga, serta pembangunan komunikasi yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan forum ini juga diarahkan untuk memperkuat peran kehumasan pemerintah sebagai garda terdepan dalam membangun persepsi publik yang positif, menjaga stabilitas informasi, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta

memperkuat citra Indonesia di tingkat nasional maupun internasional melalui strategi komunikasi yang terencana dan berkelanjutan.

Di samping itu, kegiatan ini dimaksudkan sebagai wadah untuk berbagi pengalaman, praktik baik, dan inovasi komunikasi publik antarinstansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga dapat tercipta pola komunikasi yang lebih efektif, kolaboratif, dan sesuai dengan perkembangan teknologi komunikasi saat ini.

Dengan terselenggaranya Forum Komunikasi Publik Tahun 2026, diharapkan terbangun komitmen bersama dalam memperkuat pengelolaan komunikasi publik yang berbasis nilai-nilai Pancasila, mendukung persatuan nasional, dan mampu menjawab tantangan perkembangan informasi di era digital secara profesional dan berintegritas.

2. Tujuan

Tujuan pelaksanaan Forum Komunikasi Publik Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman peserta mengenai strategi komunikasi publik yang efektif, adaptif, dan relevan dengan perkembangan teknologi informasi serta dinamika komunikasi digital saat ini.
2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi peserta dalam menyusun, mengelola, dan menyampaikan narasi komunikasi publik yang strategis, konstruktif, dan mampu memperkuat citra positif pemerintah serta reputasi bangsa.
3. Memperkuat keselarasan komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung penyampaian kebijakan dan program pembangunan nasional secara terpadu dan konsisten.
4. Mendorong terciptanya koordinasi dan kolaborasi yang lebih baik antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan komunikasi publik nasional.
5. Menghasilkan rekomendasi strategis terkait penguatan komunikasi publik, pengelolaan media digital, penanganan isu publik, dan pembangunan reputasi bangsa yang dapat dijadikan referensi dalam pelaksanaan komunikasi publik pemerintah.
6. Mendorong optimalisasi pemanfaatan media digital dan platform komunikasi modern sebagai sarana penyebaran informasi publik yang cepat, akurat, edukatif, dan kredibel.
7. Memperkuat kemampuan aparatur pemerintah dalam menghadapi tantangan komunikasi publik di era digital, termasuk dalam penanganan krisis komunikasi dan pengendalian disinformasi.
8. Meningkatkan kualitas pengelolaan hubungan media dan publikasi kelembagaan agar lebih profesional, responsif, dan mampu membangun hubungan yang baik dengan masyarakat.
9. Memperkuat citra dan reputasi lembaga pemerintah melalui pengelolaan komunikasi publik yang transparan, terukur, dan berkelanjutan.

10. Membangun jejaring komunikasi dan kerja sama antarinstansi pemerintah, media massa, akademisi, praktisi komunikasi, dan komunitas digital dalam mendukung komunikasi publik nasional yang terintegrasi.
11. Menumbuhkan semangat kolaborasi dan pertukaran praktik baik dalam pengelolaan komunikasi publik antar peserta forum.
12. Mendukung penguatan narasi kebangsaan berbasis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
13. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui penyampaian informasi yang akurat, konsisten, dan mudah dipahami.
14. Mendorong terwujudnya komunikasi publik pemerintah yang lebih modern, inovatif, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era keterbukaan informasi.
15. Mendukung terciptanya tata kelola komunikasi publik yang lebih efektif sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan nasional dan penguatan karakter bangsa.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. NAMA KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan dengan nama:
Forum Komunikasi Publik Tahun 2026

dengan tema:

“Strategi Bangun Narasi, Kuatkan Reputasi Negeri”

Tema tersebut dipilih sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat pengelolaan komunikasi publik pemerintah melalui pembangunan narasi yang strategis, kolaboratif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi serta dinamika komunikasi digital. Tema ini juga mencerminkan pentingnya peran komunikasi publik dalam membangun citra positif pemerintah, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta menjaga reputasi bangsa di tingkat nasional maupun internasional.

Melalui tema tersebut, kegiatan forum diarahkan untuk memperkuat sinergi komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, media massa, praktisi komunikasi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam membangun komunikasi publik yang profesional, konstruktif, dan berbasis nilai-nilai kebangsaan.

Selain itu, tema ini juga menjadi refleksi atas pentingnya pengelolaan narasi publik yang terarah dan konsisten di tengah meningkatnya tantangan komunikasi di era digital, termasuk penyebaran disinformasi, hoaks, polarisasi opini publik, dan dinamika informasi yang berkembang sangat cepat di ruang digital.

Dengan mengusung tema tersebut, Forum Komunikasi Publik Tahun 2026 diharapkan mampu menjadi ruang kolaborasi dan pertukaran gagasan dalam memperkuat kapasitas komunikasi publik pemerintah, meningkatkan kualitas pengelolaan media digital, serta menghasilkan strategi komunikasi yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

B. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Forum Komunikasi Publik Tahun 2026 dilaksanakan pada:

- **Hari/Tanggal** : 18 s.d. 21 Mei 2026
- **Tempat** : Kota Batam, Kepulauan Riau

Pemilihan Kota Batam sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan didasarkan pada pertimbangan strategis sebagai salah satu kota yang memiliki perkembangan ekonomi, investasi, dan komunikasi publik yang dinamis. Selain itu, Kota Batam merupakan wilayah yang memiliki posisi strategis sebagai gerbang internasional sehingga dinilai tepat sebagai lokasi penyelenggaraan forum komunikasi publik berskala nasional.

Pelaksanaan kegiatan selama empat hari dirancang untuk memberikan ruang yang cukup bagi peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara optimal, mulai dari sesi diskusi, pemaparan materi, simulasi komunikasi publik, hingga penyusunan rekomendasi forum.

Hari pertama kegiatan difokuskan pada keberangkatan peserta dan persiapan pelaksanaan kegiatan. Hari kedua dan ketiga merupakan inti pelaksanaan forum yang berisi berbagai sesi diskusi, panel, workshop, simulasi, dan penyusunan rekomendasi forum. Sementara itu, hari keempat difokuskan pada proses kepulangan peserta dan penyelesaian administrasi kegiatan.

Selama pelaksanaan kegiatan, seluruh rangkaian acara berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan didukung dengan kesiapan teknis, fasilitas, serta koordinasi yang baik antara panitia pelaksana dan seluruh pihak terkait.

C. PESERTA KEGIATAN

Peserta Forum Komunikasi Publik Tahun 2026 terdiri dari berbagai unsur yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan komunikasi publik pemerintah, antara lain:

1. Perwakilan kementerian/lembaga;
2. Pemerintah daerah;
3. Pengelola hubungan masyarakat pemerintah;
4. Praktisi komunikasi publik;
5. Media massa;
6. Akademisi;
7. Komunitas digital;
8. Pemangku kepentingan lainnya.

Keterlibatan berbagai unsur peserta tersebut bertujuan untuk membangun kolaborasi dan sinergi dalam penguatan komunikasi publik nasional. Forum ini tidak hanya menjadi ruang diskusi antarpemerintah, tetapi juga menjadi sarana pertukaran pengalaman dan praktik baik antara pemerintah, media, akademisi, dan komunitas komunikasi.

Peserta kegiatan mengikuti seluruh rangkaian acara secara aktif mulai dari registrasi, pembukaan, sesi diskusi panel, workshop, simulasi komunikasi krisis, networking session, hingga penutupan kegiatan. Antusiasme peserta terlihat dari tingginya partisipasi dalam sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif selama kegiatan.

Peserta juga terlibat aktif dalam penyusunan rekomendasi forum yang menjadi salah satu output penting kegiatan. Berbagai masukan, gagasan, dan pengalaman yang disampaikan peserta menjadi bahan penting dalam merumuskan strategi komunikasi publik yang lebih efektif dan adaptif.

Selain sebagai forum pembelajaran, kegiatan ini juga menjadi sarana membangun jejaring komunikasi antarinstansi dan antar pemangku kepentingan. Melalui interaksi yang terjalin selama kegiatan, diharapkan tercipta kolaborasi yang lebih kuat dalam mendukung pengelolaan komunikasi publik pemerintah di masa mendatang.

Partisipasi peserta dari berbagai latar belakang memberikan perspektif yang beragam terhadap tantangan dan peluang komunikasi publik di era digital. Hal tersebut memperkaya pembahasan forum dan memperluas wawasan peserta terkait strategi pengelolaan komunikasi publik yang inovatif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

D. NARASUMBER DAN MODERATOR

Forum Komunikasi Publik Tahun 2026 menghadirkan narasumber yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan kapasitas di bidang komunikasi publik, pemerintahan, diplomasi publik, media digital, dan pengelolaan reputasi lembaga.

Adapun narasumber kegiatan terdiri dari:

1. Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kemenkomdigi;
2. Walikota Batam;
3. Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah Badan Komunikasi Pemerintah RI;
4. Public Policy and Government Relations TikTok Indonesia;
5. Dino Patti Djalal.

Kehadiran para narasumber tersebut memberikan wawasan yang komprehensif terkait strategi komunikasi publik pemerintah, pengelolaan media digital, branding daerah, diplomasi publik, penguatan narasi kebangsaan, hingga pengelolaan reputasi bangsa di era digital.

Materi yang disampaikan narasumber mencakup berbagai isu strategis komunikasi publik, antara lain:

- strategi komunikasi pemerintah di era digital;
- pengelolaan komunikasi kelembagaan;
- branding daerah dan reputasi pemerintah;
- pemanfaatan media digital dalam penyebaran narasi positif;
- komunikasi publik internasional dan diplomasi modern;
- penguatan narasi kebangsaan berbasis nilai-nilai Pancasila;
- strategi penanganan isu dan krisis komunikasi.

Pemaparan materi berlangsung secara interaktif dan mendapatkan respons positif dari peserta. Diskusi yang berlangsung selama forum menunjukkan tingginya perhatian peserta terhadap pentingnya penguatan komunikasi publik pemerintah yang lebih modern, responsif, dan terintegrasi.

Selain narasumber, kegiatan ini juga didukung oleh moderator yang berasal dari unsur Badan Komunikasi Pemerintah RI. Moderator berperan dalam memandu jalannya diskusi, menjaga dinamika forum, serta memastikan setiap sesi berlangsung secara efektif, tertib, dan interaktif.

Peran moderator sangat penting dalam membangun komunikasi dua arah antara narasumber dan peserta sehingga pembahasan materi dapat berjalan secara mendalam

dan partisipatif. Moderator juga membantu menjaga fokus diskusi agar tetap sesuai dengan tema dan tujuan kegiatan.

Kehadiran narasumber dan moderator yang kompeten menjadi salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan pelaksanaan Forum Komunikasi Publik Tahun 2026.

E. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik Tahun 2026 dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan yang dirancang secara sistematis guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan secara efektif, tertib, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan tahap awal dalam pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk mempersiapkan seluruh kebutuhan kegiatan secara menyeluruh. Pada tahap ini, panitia melaksanakan penyusunan konsep kegiatan yang mencakup tema, tujuan, sasaran peserta, format kegiatan, serta strategi pelaksanaan forum.

Selain itu, dilakukan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), jadwal kegiatan, serta kebutuhan teknis lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan. Tahap ini juga mencakup penentuan narasumber, moderator, peserta kegiatan, dan penyusunan rundown acara.

Panitia juga melaksanakan koordinasi internal terkait pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing bidang kepanitiaan, termasuk bidang acara, registrasi, dokumentasi, perlengkapan, konsumsi, transportasi, dan publikasi.

Perencanaan dilakukan secara matang guna memastikan seluruh aspek kegiatan dapat dipersiapkan secara optimal dan meminimalkan potensi kendala selama pelaksanaan kegiatan.

2. Tahap Koordinasi

Tahap koordinasi dilakukan dengan berbagai pihak terkait baik internal maupun eksternal. Koordinasi internal dilakukan antarbidang kepanitiaan guna memastikan kesiapan teknis dan administrasi kegiatan berjalan sesuai rencana.

Sementara itu, koordinasi eksternal dilakukan dengan narasumber, moderator, pihak hotel, penyedia perlengkapan kegiatan, tim dokumentasi, dan pihak terkait lainnya. Koordinasi tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan tempat kegiatan, perlengkapan audio visual, kebutuhan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan berbagai kebutuhan teknis lainnya.

Pada tahap ini juga dilakukan finalisasi rundown acara, sinkronisasi materi narasumber, penyusunan daftar peserta, serta penyiapan media publikasi kegiatan.

Koordinasi yang intensif dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan guna memastikan seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap alur kegiatan dan tanggung jawab masing-masing.

3. Tahap Persiapan Teknis dan Administratif

Tahap persiapan teknis dan administratif dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan kegiatan telah tersedia sebelum kegiatan dimulai. Pada tahap ini dilakukan:

- distribusi undangan peserta;
- konfirmasi kehadiran peserta;
- penyusunan daftar hadir;
- penyiapan ruang kegiatan;
- penyiapan perlengkapan audio visual;
- penyiapan backdrop dan media publikasi;
- penyiapan bahan materi kegiatan;
- penyiapan perlengkapan peserta;
- penyiapan dokumentasi dan publikasi kegiatan;
- penyiapan akomodasi dan transportasi peserta dan narasumber.

Panitia juga melakukan pengecekan terhadap kesiapan ruang kegiatan, sistem suara, layar presentasi, jaringan internet, serta kebutuhan teknis lainnya guna memastikan kegiatan dapat berjalan tanpa hambatan.

Selain itu, dilakukan pula penyiapan media dokumentasi berupa foto dan video kegiatan yang nantinya digunakan sebagai bahan publikasi dan pelaporan kegiatan.

4. Tahap Pra-Pelaksanaan

Tahap pra-pelaksanaan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Tahap ini meliputi:

- keberangkatan peserta dan panitia menuju Kota Batam;
- registrasi kedatangan peserta;
- proses check-in hotel;
- pengecekan ruang kegiatan;
- briefing internal panitia;
- pengecekan perlengkapan teknis kegiatan.

Pada tahap ini panitia memastikan seluruh peserta dan narasumber telah tiba di lokasi kegiatan sesuai jadwal yang ditentukan. Selain itu dilakukan pengecekan akhir terhadap kesiapan ruang acara, perlengkapan teknis, dan kebutuhan pendukung lainnya.

Briefing internal panitia juga dilaksanakan untuk memastikan seluruh panitia memahami alur kegiatan dan tugas masing-masing selama pelaksanaan forum berlangsung.

5. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Tahap pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 sebagai inti kegiatan Forum Komunikasi Publik Tahun 2026.

Rangkaian kegiatan meliputi:

- registrasi peserta;
- pembukaan kegiatan;
- sambutan;
- diskusi panel;

- paparan narasumber;
- sesi tanya jawab;
- networking session;
- workshop dan simulasi komunikasi krisis;
- penyusunan rekomendasi forum;
- penutupan kegiatan.

Selama pelaksanaan kegiatan, peserta mengikuti seluruh sesi secara aktif dan antusias. Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pertukaran gagasan dan pengalaman terkait pengelolaan komunikasi publik pemerintah.

Kegiatan workshop dan simulasi komunikasi krisis menjadi salah satu sesi penting dalam forum karena memberikan pengalaman praktis kepada peserta dalam menghadapi isu dan tantangan komunikasi di era digital.

Pada akhir kegiatan, peserta bersama narasumber dan moderator menyusun rekomendasi forum yang berisi berbagai strategi dan masukan dalam penguatan komunikasi publik nasional.

6. Tahap Pasca Pelaksanaan

Tahap pasca pelaksanaan dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2026 yang meliputi:

- check-out hotel;
- kepulangan peserta;
- evaluasi kegiatan;
- pengumpulan dokumentasi;
- penyusunan laporan kegiatan;
- penyelesaian administrasi kegiatan.

Pada tahap ini panitia melakukan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan baik dari aspek teknis maupun substansi. Evaluasi dilakukan sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan serupa di masa mendatang.

Selain itu, dilakukan pengumpulan seluruh dokumentasi kegiatan dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi dan dokumentasi resmi pelaksanaan Forum Komunikasi Publik Tahun 2026.

BAB III

URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. HARI PERTAMA – SENIN, 18 MEI 2026

Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik Tahun 2026 diawali pada hari Senin, 18 Mei 2026 dengan keberangkatan peserta, panitia, dan narasumber menuju Kota Batam, Kepulauan Riau. Keberangkatan peserta dilakukan dari berbagai daerah sesuai jadwal perjalanan masing-masing yang telah dikoordinasikan sebelumnya oleh panitia pelaksana.

Setibanya di Kota Batam, peserta diarahkan menuju lokasi hotel untuk melaksanakan proses registrasi kedatangan dan check-in penginapan. Panitia registrasi melakukan verifikasi data peserta, pembagian informasi kamar, serta penyampaian informasi teknis terkait pelaksanaan kegiatan yang akan berlangsung pada hari berikutnya.

Pada hari pertama ini, suasana koordinasi dan persiapan kegiatan sudah terlihat sejak peserta mulai berdatangan. Panitia memastikan seluruh kebutuhan peserta dapat terpenuhi dengan baik, termasuk akomodasi, transportasi lokal, serta informasi pelaksanaan kegiatan. Peserta juga mulai membangun komunikasi dan interaksi antarpeserta dari berbagai instansi dan daerah.

Selain proses kedatangan peserta, panitia pelaksana melaksanakan pengecekan akhir terhadap seluruh kebutuhan teknis kegiatan. Pengecekan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan pelaksanaan forum dapat berjalan lancar, tertib, dan sesuai dengan rundown yang telah disusun sebelumnya.

Beberapa hal yang dilakukan panitia pada tahap ini antara lain:

- pengecekan ruang kegiatan;
- pemasangan backdrop dan media publikasi;
- pengecekan sistem audio visual;
- penataan meja registrasi;
- penyiapan perlengkapan peserta;
- penyiapan bahan materi narasumber;
- pengecekan jaringan internet;
- penyiapan dokumentasi kegiatan;
- koordinasi dengan pihak hotel dan vendor perlengkapan.

Panitia juga memastikan kesiapan ruang utama kegiatan agar mendukung kenyamanan peserta selama mengikuti forum. Pengaturan tempat duduk peserta, posisi narasumber, meja moderator, pencahayaan ruangan, layar presentasi, dan sistem suara diperiksa secara detail guna meminimalkan potensi kendala teknis saat kegiatan berlangsung.

Selain kesiapan teknis, panitia juga melakukan koordinasi terkait kebutuhan publikasi dan dokumentasi kegiatan. Tim dokumentasi melakukan pengaturan titik pengambilan gambar, kebutuhan video highlight, dokumentasi foto resmi, serta penyiapan media publikasi digital yang akan digunakan selama kegiatan berlangsung.

Pada malam hari dilaksanakan briefing internal panitia yang dipimpin oleh koordinator pelaksana kegiatan. Briefing tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh panitia memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing selama pelaksanaan kegiatan.

Dalam briefing tersebut dibahas beberapa hal penting, antara lain:

- alur registrasi peserta;
- pengaturan protokol kegiatan;
- kesiapan narasumber dan moderator;
- pembagian tugas setiap bidang kepanitiaan;
- mekanisme dokumentasi dan publikasi;
- teknis pendampingan peserta;
- penanganan kendala teknis;
- antisipasi keadaan darurat;
- kesiapan konsumsi dan perlengkapan kegiatan.

Koordinasi internal tersebut berlangsung secara intensif dan menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatan inti pada hari berikutnya. Seluruh panitia menunjukkan kesiapan dan komitmen untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Forum Komunikasi Publik Tahun 2026.

Secara umum, pelaksanaan kegiatan pada hari pertama berjalan dengan baik dan lancar. Seluruh peserta telah tiba di lokasi kegiatan sesuai jadwal, proses registrasi berjalan tertib, dan seluruh kebutuhan teknis kegiatan berhasil dipersiapkan dengan optimal.

B. HARI KEDUA – SELASA, 19 MEI 2026

Pelaksanaan kegiatan inti Forum Komunikasi Publik Tahun 2026 dimulai pada hari Selasa, 19 Mei 2026. Kegiatan diawali pada pukul 07.30 WIB dengan proses registrasi peserta dan pembagian ID card serta perlengkapan kegiatan. Panitia registrasi melayani peserta dengan tertib dan memastikan seluruh peserta memperoleh perlengkapan forum yang telah disiapkan.

Peserta kemudian diarahkan memasuki ruang kegiatan sambil menyaksikan pemutaran video teaser serta media visual yang menampilkan tema kegiatan, profil kelembagaan, dan gambaran umum komunikasi publik pemerintah di era digital. Pemutaran media visual tersebut bertujuan membangun suasana kegiatan yang informatif dan inspiratif.

Acara resmi dibuka oleh Master of Ceremony (MC) yang memandu seluruh rangkaian kegiatan pembukaan. Selanjutnya seluruh peserta bersama-sama menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya tiga stanza sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan dan semangat persatuan nasional. Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan doa guna memohon kelancaran seluruh rangkaian kegiatan.

Kegiatan pembukaan dilanjutkan dengan sambutan Sekretaris Utama BPIP sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Dalam sambutannya disampaikan bahwa komunikasi publik memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan nasional, menjaga stabilitas informasi, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Selain itu, disampaikan pula bahwa tantangan komunikasi di era digital semakin kompleks sehingga pemerintah dituntut untuk mampu membangun narasi publik yang kuat, cepat, akurat, dan konsisten. Penguatan sinergi komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, media massa, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam membangun reputasi bangsa yang positif.

Setelah pembukaan resmi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi oleh Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kemenkomdigi. Pada sesi ini narasumber menyampaikan materi mengenai strategi komunikasi kelembagaan di era digital.

Materi yang disampaikan meliputi:

- penguatan komunikasi pemerintah di ruang digital;
- pentingnya kecepatan dan akurasi informasi;
- strategi pengelolaan media sosial pemerintah;
- penguatan koordinasi komunikasi antarinstansi;
- penanganan disinformasi dan hoaks;
- pengelolaan isu publik;
- penguatan komunikasi berbasis data;
- optimalisasi media digital dalam penyebaran informasi publik.

Narasumber menekankan bahwa komunikasi publik pemerintah saat ini harus mampu menyesuaikan pola komunikasi masyarakat digital yang cepat, visual, dan interaktif. Pemerintah perlu membangun komunikasi yang tidak hanya informatif tetapi juga mampu membangun kedekatan dengan masyarakat.

Sesi diskusi berlangsung sangat interaktif. Peserta menyampaikan berbagai pertanyaan terkait tantangan komunikasi digital di instansi masing-masing, strategi menghadapi opini negatif di media sosial, pengelolaan media pemerintah, hingga penguatan koordinasi komunikasi antar daerah.

Setelah sesi pagi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan plakat kepada narasumber dan sesi foto bersama. Selanjutnya peserta melaksanakan istirahat, salat, dan makan siang (ISHOMA).

Pada sesi siang dilaksanakan diskusi panel yang menghadirkan beberapa narasumber dari unsur pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan platform digital nasional. Diskusi panel ini menjadi salah satu sesi utama dalam kegiatan Forum Komunikasi Publik Tahun 2026.

Walikota Batam menyampaikan materi mengenai strategi branding daerah dan penguatan reputasi Kota Batam melalui komunikasi publik yang kolaboratif. Dalam paparannya dijelaskan bahwa pembangunan citra daerah tidak hanya dilakukan melalui promosi, tetapi juga melalui konsistensi komunikasi, pelayanan publik yang baik, dan penguatan identitas daerah.

Narasumber juga menjelaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, media, masyarakat, dan sektor swasta dalam membangun citra positif daerah. Kota Batam

dipaparkan sebagai contoh daerah yang terus membangun reputasi melalui komunikasi yang terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Selanjutnya Deputy Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah Badan Komunikasi Pemerintah RI menyampaikan materi mengenai pentingnya Pancasila sebagai soul of branding dalam membangun narasi tunggal pemerintah di ruang digital.

Materi tersebut menekankan bahwa komunikasi publik pemerintah harus tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai identitas bangsa. Narasi komunikasi publik tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi, tetapi juga memperkuat persatuan nasional, optimisme masyarakat, dan semangat kebangsaan.

Pada sesi berikutnya, Public Policy and Government Relations TikTok Indonesia menyampaikan materi mengenai optimalisasi platform video pendek sebagai media penyebarluasan narasi positif dan penguatan reputasi bangsa di era digital.

Dalam paparannya dijelaskan bahwa konten video pendek memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk opini publik, khususnya di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, pemerintah perlu memanfaatkan platform digital secara kreatif dan inovatif untuk menyampaikan informasi publik yang positif, edukatif, dan mudah dipahami masyarakat.

Diskusi panel berlangsung dinamis dengan tingginya partisipasi peserta. Berbagai isu terkait pengelolaan media sosial pemerintah, strategi komunikasi kreatif, penguatan narasi kebangsaan, dan tantangan komunikasi digital menjadi topik utama dalam sesi diskusi.

Setelah sesi diskusi panel selesai, kegiatan dilanjutkan dengan coffee break dan sesi diskusi lanjutan serta tanya jawab. Peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdialog langsung dengan narasumber mengenai berbagai tantangan komunikasi publik yang dihadapi di daerah maupun instansi masing-masing.

Pada malam hari dilaksanakan sharing session dan networking antarpeserta. Kegiatan ini menjadi wadah berbagi pengalaman dan praktik baik komunikasi publik dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Peserta menyampaikan berbagai pengalaman terkait:

- pengelolaan media sosial pemerintah;
- penanganan isu publik;
- strategi komunikasi daerah;
- penguatan komunikasi berbasis komunitas;
- pengelolaan hubungan media;
- penguatan publikasi kelembagaan;
- pemanfaatan teknologi digital dalam komunikasi publik.

Suasana diskusi berlangsung hangat dan penuh semangat kolaborasi. Networking session tersebut diharapkan mampu memperkuat jejaring komunikasi dan kerja sama antarpeserta dalam mendukung pengelolaan komunikasi publik nasional yang lebih baik.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan hari kedua berjalan dengan lancar, tertib, dan sesuai dengan rundown yang telah ditetapkan. Antusiasme peserta terlihat tinggi selama mengikuti seluruh sesi kegiatan.

C. HARI KETIGA – RABU, 20 MEI 2026

Pelaksanaan kegiatan pada hari ketiga diawali dengan coffee morning dan networking ringan antar peserta. Kegiatan tersebut dimanfaatkan peserta untuk membangun komunikasi informal dan memperkuat hubungan kerja sama antarinstansi.

Selanjutnya dilakukan pemutaran video highlight kegiatan hari sebelumnya yang menampilkan rangkaian dokumentasi pelaksanaan forum, kutipan materi narasumber, serta dinamika diskusi peserta selama kegiatan berlangsung.

Setelah itu kegiatan memasuki sesi utama dengan menghadirkan Dino Patti Djalal sebagai narasumber utama pada hari ketiga. Dalam pemaparannya, narasumber menyampaikan materi mengenai komunikasi publik kelas dunia dan praktik diplomasi modern.

Materi yang disampaikan meliputi:

- strategi nation branding;
- diplomasi publik internasional;
- penguatan citra Indonesia di mata dunia;
- komunikasi strategis pemerintah;
- penguatan identitas nasional;
- komunikasi lintas budaya;
- peran media internasional dalam membangun persepsi global.

Narasumber menjelaskan bahwa reputasi bangsa tidak dibangun dalam waktu singkat, melainkan melalui komunikasi yang konsisten, terencana, dan mampu menunjukkan identitas positif bangsa Indonesia kepada dunia internasional.

Selain itu, dijelaskan pula bahwa diplomasi publik tidak hanya dilakukan oleh diplomat, tetapi juga oleh seluruh elemen bangsa melalui komunikasi yang positif dan konstruktif di ruang publik.

Peserta terlihat sangat antusias mengikuti sesi ini. Berbagai pertanyaan disampaikan terkait strategi membangun citra Indonesia di tingkat internasional, penguatan komunikasi global pemerintah, serta pengelolaan reputasi bangsa di era digital.

Setelah sesi diskusi dan tanya jawab selesai, kegiatan dilanjutkan dengan simulasi krisis komunikasi dalam bentuk kerja kelompok. Pada sesi ini peserta dibagi menjadi beberapa kelompok dan diberikan studi kasus terkait penanganan isu publik dan krisis komunikasi pemerintah.

Masing-masing kelompok diminta untuk:

- mengidentifikasi permasalahan komunikasi;
- menyusun strategi komunikasi krisis;
- menentukan pesan utama;
- menyusun strategi media;

- menentukan langkah penanganan isu;
- menyusun pola komunikasi kepada publik.

Kegiatan simulasi berlangsung aktif dan partisipatif. Peserta berdiskusi secara intensif untuk menyusun strategi komunikasi yang efektif dalam menghadapi situasi krisis.

Hasil simulasi kemudian dipresentasikan di hadapan moderator dan peserta lainnya.

Moderator memberikan masukan terkait efektivitas strategi komunikasi yang disusun masing-masing kelompok serta pentingnya koordinasi komunikasi dalam situasi krisis.

Sesi simulasi ini memberikan pengalaman praktis kepada peserta mengenai pentingnya kesiapan komunikasi pemerintah dalam menghadapi isu publik dan dinamika informasi yang berkembang secara cepat di ruang digital.

Setelah sesi simulasi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan penyusunan rekomendasi forum. Penyusunan rekomendasi dilakukan secara bersama-sama berdasarkan hasil diskusi selama kegiatan berlangsung.

Adapun beberapa rekomendasi utama yang dihasilkan dalam forum antara lain:

- penguatan koordinasi komunikasi pemerintah pusat dan daerah;
- optimalisasi media digital dalam komunikasi publik;
- penguatan kapasitas SDM komunikasi publik;
- penguatan strategi komunikasi krisis;
- pengembangan narasi publik berbasis nilai Pancasila;
- peningkatan kolaborasi dengan media massa dan komunitas digital;
- penguatan literasi digital masyarakat;
- peningkatan kualitas publikasi pemerintah yang adaptif dan inovatif.

Pada malam hari dilaksanakan penutupan kegiatan yang diisi dengan penyampaian hasil forum, sambutan penutup, menyanyikan lagu Bagimu Negeri, dan dokumentasi bersama.

Dalam sambutan penutup disampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber, moderator, peserta, dan panitia yang telah mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. Selain itu disampaikan pula harapan agar hasil forum dapat menjadi referensi dalam penguatan komunikasi publik pemerintah ke depan.

Kegiatan penutupan berlangsung dengan suasana hangat, penuh semangat kebersamaan, dan komitmen untuk terus memperkuat komunikasi publik nasional.

D. HARI KEEMPAT – KAMIS, 21 MEI 2026

Pada hari terakhir pelaksanaan kegiatan, peserta melaksanakan proses check-out hotel dan bersiap kembali ke daerah masing-masing sesuai jadwal perjalanan yang telah ditentukan.

Panitia membantu proses koordinasi kepulangan peserta serta memastikan seluruh kebutuhan administrasi dan transportasi peserta dapat berjalan dengan baik dan tertib.

Selain proses kepulangan peserta, panitia juga melaksanakan evaluasi internal kegiatan. Evaluasi dilakukan untuk menilai pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan baik dari aspek teknis, substansi, pelayanan peserta, koordinasi panitia, maupun efektivitas pelaksanaan forum.

Evaluasi internal mencakup beberapa aspek antara lain:

- kesiapan teknis kegiatan;
- efektivitas rundown acara;
- kualitas materi narasumber;
- partisipasi peserta;
- pelaksanaan registrasi;
- dokumentasi dan publikasi;
- kesiapan perlengkapan kegiatan;
- koordinasi antaranitia;
- kendala teknis selama kegiatan.

Selain itu dilakukan pengumpulan seluruh dokumentasi kegiatan berupa foto, video, materi presentasi narasumber, daftar hadir peserta, dan hasil rekomendasi forum sebagai bahan penyusunan laporan kegiatan.

Panitia juga melaksanakan penyelesaian administrasi kegiatan, pengumpulan laporan masing-masing bidang kepanitiaan, serta inventarisasi hasil rekomendasi forum untuk ditindaklanjuti pada kegiatan selanjutnya.

Secara umum, seluruh rangkaian Forum Komunikasi Publik Tahun 2026 berjalan dengan baik, lancar, tertib, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam penguatan komunikasi publik pemerintah dan pembangunan reputasi bangsa di era digital.

BAB IV

HASIL KEGIATAN

A. OUTPUT

Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik Tahun 2026 bertema “Strategi Bangun Narasi, Kuatkan Reputasi Negeri” telah menghasilkan berbagai output yang mendukung penguatan komunikasi publik pemerintah dan peningkatan sinergi antar pemangku kepentingan. Seluruh output kegiatan merupakan hasil dari rangkaian proses perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan yang dilaksanakan secara terstruktur dan kolaboratif.

Adapun output kegiatan yang berhasil dicapai antara lain sebagai berikut:

1. Terselenggaranya Forum Komunikasi Publik Tahun 2026 dengan Baik dan Lancar

Kegiatan Forum Komunikasi Publik Tahun 2026 telah terlaksana dengan baik, tertib, dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Seluruh rangkaian kegiatan mulai dari registrasi peserta, pembukaan, pemaparan materi, diskusi panel, simulasi komunikasi krisis, penyusunan rekomendasi forum, hingga penutupan kegiatan dapat berjalan secara optimal.

Kelancaran pelaksanaan kegiatan didukung oleh koordinasi yang baik antara panitia pelaksana, narasumber, moderator, peserta, serta seluruh pihak terkait. Dukungan teknis, kesiapan fasilitas kegiatan, serta partisipasi aktif peserta turut menjadi faktor penting dalam keberhasilan penyelenggaraan forum.

Selain itu, seluruh kebutuhan kegiatan baik administrasi, perlengkapan, dokumentasi, konsumsi, maupun akomodasi dapat dipenuhi dengan baik sehingga mendukung kenyamanan peserta selama mengikuti kegiatan.

2. Terlaksananya Seluruh Rangkaian Kegiatan Sesuai Rundown

Seluruh agenda kegiatan yang telah disusun dalam rundown dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan tahapan yang telah direncanakan sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan mencakup:

- registrasi peserta;
- pembukaan kegiatan;
- sambutan pimpinan;
- pemaparan materi narasumber;
- diskusi panel;
- sesi tanya jawab;
- networking session;
- simulasi komunikasi krisis;
- penyusunan rekomendasi forum;
- penutupan kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung secara interaktif dan partisipatif. Peserta menunjukkan keterlibatan aktif dalam setiap sesi diskusi dan workshop sehingga tujuan kegiatan dapat tercapai secara optimal.

Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rundown menunjukkan bahwa proses perencanaan dan koordinasi kegiatan telah dilakukan secara baik dan matang.

3. Tersusunnya Rekomendasi Strategis Komunikasi Publik

Salah satu output utama kegiatan adalah tersusunnya rekomendasi strategis terkait penguatan komunikasi publik nasional. Rekomendasi tersebut disusun berdasarkan hasil diskusi, masukan narasumber, praktik baik peserta, serta hasil simulasi komunikasi krisis selama kegiatan berlangsung.

Adapun beberapa poin rekomendasi yang dihasilkan dalam forum antara lain:

- penguatan koordinasi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah;
- penguatan kapasitas sumber daya manusia komunikasi publik;
- optimalisasi penggunaan media digital pemerintah;
- penguatan strategi komunikasi krisis;
- pengembangan narasi publik berbasis nilai-nilai Pancasila;
- peningkatan kolaborasi dengan media massa dan komunitas digital;
- penguatan literasi digital masyarakat;
- pengembangan strategi komunikasi yang lebih adaptif dan inovatif.

Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan dan strategi komunikasi publik pemerintah ke depan.

4. Terbangunnya Jejaring Komunikasi Antar Peserta

Pelaksanaan forum juga berhasil membangun jejaring komunikasi dan kerja sama antar peserta yang berasal dari berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, media massa, akademisi, dan praktisi komunikasi publik.

Interaksi yang terjalin selama kegiatan memberikan ruang bagi peserta untuk saling bertukar pengalaman, praktik baik, dan strategi komunikasi yang diterapkan di instansi masing-masing. Jejaring komunikasi tersebut diharapkan dapat mendukung koordinasi komunikasi publik yang lebih efektif dan terpadu di masa mendatang.

Selain itu, kegiatan networking session yang dilaksanakan selama forum berlangsung turut memperkuat hubungan profesional antar peserta dan membuka peluang kerja sama lintas sektor dalam pengelolaan komunikasi publik.

5. Tersusunnya Laporan dan Dokumentasi Kegiatan

Output lain yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi dan dokumentasi resmi kegiatan.

Laporan kegiatan memuat:

- latar belakang kegiatan;
- tujuan kegiatan;
- tahapan pelaksanaan;
- uraian kegiatan;

- hasil kegiatan;
- evaluasi kegiatan;
- rekomendasi forum;
- dokumentasi kegiatan.

Selain laporan tertulis, kegiatan ini juga menghasilkan dokumentasi foto, video, materi presentasi narasumber, dan media publikasi digital yang dapat digunakan sebagai arsip kelembagaan maupun bahan publikasi kegiatan.

Dokumentasi kegiatan menjadi bagian penting dalam mendukung akuntabilitas pelaksanaan kegiatan serta sebagai referensi pelaksanaan kegiatan serupa di masa mendatang.

6. Meningkatnya Partisipasi dan Interaksi Peserta dalam Forum Diskusi

Selama pelaksanaan kegiatan, peserta menunjukkan antusiasme dan partisipasi aktif dalam seluruh sesi kegiatan. Tingginya interaksi peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan, masukan, serta diskusi yang berkembang selama forum berlangsung.

Partisipasi aktif tersebut menunjukkan tingginya perhatian peserta terhadap isu-isu komunikasi publik dan pentingnya penguatan strategi komunikasi pemerintah di era digital.

7. Terlaksananya Simulasi Komunikasi Krisis Secara Interaktif

Pelaksanaan simulasi komunikasi krisis menjadi salah satu output penting kegiatan karena memberikan pengalaman praktis kepada peserta dalam menghadapi situasi krisis komunikasi pemerintah.

Melalui simulasi tersebut peserta memperoleh pemahaman mengenai:

- strategi penanganan isu publik;
- pengelolaan komunikasi krisis;
- penyusunan pesan utama;
- strategi pengelolaan media;
- koordinasi komunikasi dalam situasi darurat.

Kegiatan simulasi juga mendorong peserta untuk berpikir strategis dan responsif dalam menghadapi dinamika komunikasi di ruang publik.

B. OUTCOME

Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik Tahun 2026 tidak hanya menghasilkan output kegiatan, tetapi juga memberikan dampak positif (outcome) terhadap peningkatan kapasitas komunikasi publik pemerintah dan penguatan sinergi antar pemangku kepentingan.

Adapun outcome yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kapasitas Peserta dalam Pengelolaan Komunikasi Publik

Melalui berbagai sesi pemaparan materi, diskusi panel, simulasi, dan sharing session, peserta memperoleh tambahan wawasan dan pengetahuan terkait strategi komunikasi publik yang efektif dan adaptif.

Peserta memperoleh pemahaman baru mengenai:

- strategi komunikasi digital;
- pengelolaan media sosial pemerintah;
- komunikasi krisis;
- pengelolaan reputasi lembaga;
- penguatan komunikasi berbasis data;
- pembangunan narasi publik yang konstruktif.

Peningkatan kapasitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas peserta di instansi masing-masing dalam mengelola komunikasi publik pemerintah secara lebih profesional.

2. Meningkatnya Pemahaman Mengenai Pengelolaan Narasi Digital

Kegiatan ini juga meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya pengelolaan narasi digital di era perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat.

Peserta memahami bahwa komunikasi publik tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga pada kemampuan membangun persepsi publik, menjaga konsistensi pesan, dan mengelola opini masyarakat secara positif.

Pemahaman tersebut menjadi penting dalam mendukung penguatan citra pemerintah dan reputasi bangsa di ruang digital.

3. Terbangunnya Keselarasan Komunikasi Pemerintah Pusat dan Daerah

Forum ini berhasil memperkuat koordinasi dan keselarasan komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Melalui forum diskusi dan pertukaran pengalaman, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya penyampaian pesan pemerintah secara terpadu dan konsisten.

Keselarasan komunikasi tersebut diharapkan dapat mendukung efektivitas penyampaian kebijakan pemerintah kepada masyarakat dan meminimalkan perbedaan persepsi informasi di ruang publik.

4. Meningkatnya Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan

Kegiatan forum berhasil memperkuat kolaborasi antara pemerintah, media massa, akademisi, praktisi komunikasi, dan komunitas digital dalam mendukung pengelolaan komunikasi publik nasional.

Kolaborasi tersebut menjadi penting dalam membangun komunikasi publik yang partisipatif, inklusif, dan mampu menjawab tantangan komunikasi di era digital.

Selain itu, forum ini juga membuka ruang kerja sama lintas sektor dalam pengembangan strategi komunikasi publik yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

5. Menguatnya Pengelolaan Reputasi Pemerintah dan Bangsa

Melalui materi dan diskusi yang disampaikan selama forum berlangsung, peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan reputasi pemerintah dan bangsa melalui komunikasi publik yang strategis.

Peserta memahami bahwa reputasi lembaga dan pemerintah dibangun melalui komunikasi yang konsisten, transparan, cepat, dan kredibel. Oleh karena itu, penguatan komunikasi publik menjadi bagian penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

6. Meningkatnya Pemanfaatan Media Digital dalam Komunikasi Publik

Kegiatan ini juga mendorong peserta untuk lebih optimal dalam memanfaatkan media digital sebagai sarana komunikasi publik pemerintah.

Peserta memperoleh pemahaman mengenai:

- pemanfaatan media sosial secara efektif;
- pengembangan konten kreatif;
- strategi komunikasi visual;
- optimalisasi platform video digital;
- penguatan komunikasi berbasis teknologi informasi.

Pemanfaatan media digital yang optimal diharapkan mampu meningkatkan jangkauan informasi pemerintah kepada masyarakat secara lebih luas dan efektif.

7. Menguatnya Pemahaman Mengenai Komunikasi Krisis

Melalui simulasi dan studi kasus yang dilaksanakan selama kegiatan, peserta memperoleh pengalaman praktis dalam menghadapi situasi krisis komunikasi pemerintah.

Pemahaman mengenai komunikasi krisis menjadi penting dalam mendukung kesiapan instansi pemerintah dalam menghadapi isu publik dan dinamika informasi yang berkembang secara cepat di masyarakat.

Dengan adanya peningkatan pemahaman tersebut, diharapkan pemerintah mampu merespons isu publik secara lebih cepat, tepat, dan terukur.

BAB V

EVALUASI KEGIATAN

Secara umum pelaksanaan Forum Komunikasi Publik Tahun 2026 berjalan dengan baik, tertib, dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana dengan lancar berkat koordinasi yang baik antara panitia, narasumber, moderator, peserta, dan seluruh pihak terkait.

Peserta menunjukkan antusiasme dan partisipasi yang tinggi selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Hal tersebut terlihat dari aktifnya peserta dalam sesi diskusi, tanya jawab, simulasi komunikasi krisis, serta penyusunan rekomendasi forum.

Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh panitia dan peserta, terdapat beberapa catatan evaluasi yang menjadi perhatian untuk pelaksanaan kegiatan serupa di masa mendatang, antara lain sebagai berikut:

1. Perlunya Penambahan Durasi Simulasi Komunikasi Krisis

Sesi simulasi komunikasi krisis mendapatkan perhatian dan antusiasme tinggi dari peserta karena memberikan pengalaman praktis dalam menghadapi situasi krisis komunikasi pemerintah.

Namun demikian, durasi pelaksanaan simulasi dinilai masih terbatas sehingga peserta belum dapat mengeksplorasi seluruh strategi komunikasi secara lebih mendalam. Oleh karena itu, pada pelaksanaan kegiatan selanjutnya disarankan agar waktu simulasi diperpanjang sehingga pembahasan studi kasus dapat dilakukan lebih optimal.

2. Perlunya Penguatan Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Forum

Hasil rekomendasi forum yang telah disusun perlu ditindaklanjuti secara lebih konkret agar dapat memberikan dampak nyata terhadap penguatan komunikasi publik pemerintah.

Diperlukan mekanisme koordinasi lanjutan dan monitoring terhadap implementasi rekomendasi forum sehingga hasil kegiatan tidak berhenti pada forum diskusi semata, tetapi dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan komunikasi publik di instansi masing-masing.

3. Perlunya Pelaksanaan Forum Secara Berkala

Peserta menyampaikan harapan agar kegiatan Forum Komunikasi Publik dapat dilaksanakan secara berkala sebagai wadah penguatan kapasitas komunikasi publik dan forum berbagi praktik baik antarinstansi.

Pelaksanaan forum secara rutin dinilai penting mengingat perkembangan teknologi informasi dan dinamika komunikasi publik terus berubah dengan cepat sehingga diperlukan ruang pembelajaran dan koordinasi yang berkelanjutan.

4. Perlunya Peningkatan Kolaborasi Lintas Sektor

Penguatan komunikasi publik memerlukan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah tetapi juga media massa, akademisi, praktisi komunikasi, komunitas digital, dan masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan komunikasi publik agar narasi yang dibangun dapat lebih luas, inklusif, dan efektif menjangkau masyarakat.

5. Perlunya Penguatan Pengelolaan Media Digital Pemerintah

Perkembangan media digital yang sangat cepat menuntut pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan media digital dan media sosial pemerintah.

Peserta menilai bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan konten kreatif, dan pemanfaatan teknologi komunikasi digital perlu terus ditingkatkan agar komunikasi pemerintah lebih adaptif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Meskipun terdapat beberapa catatan evaluasi, hambatan dan kendala yang muncul selama kegiatan secara umum dapat diatasi dengan baik melalui koordinasi dan komunikasi yang efektif antar panitia dan pihak terkait.

Evaluasi kegiatan ini diharapkan menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan kegiatan serupa di masa mendatang sehingga kegiatan Forum Komunikasi Publik dapat memberikan manfaat yang lebih optimal dalam mendukung penguatan komunikasi publik nasional.

BAB VI

PENUTUP

Forum Komunikasi Publik Tahun 2026 bertema “Strategi Bangun Narasi, Kuatkan Reputasi Negeri” telah terlaksana dengan baik, tertib, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan ini menjadi salah satu upaya strategis dalam memperkuat pengelolaan komunikasi publik pemerintah di tengah dinamika perkembangan teknologi informasi dan komunikasi digital yang semakin kompleks.

Melalui forum ini telah terbangun ruang diskusi, koordinasi, dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, media massa, praktisi komunikasi, akademisi, komunitas digital, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung penguatan komunikasi publik nasional.

Pelaksanaan kegiatan ini juga memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi publik, penguatan pengelolaan narasi digital, peningkatan pemahaman mengenai komunikasi krisis, serta penguatan strategi komunikasi pemerintah yang lebih adaptif, inovatif, dan profesional.

Hasil dan rekomendasi forum diharapkan dapat menjadi bahan tindak lanjut dalam pengembangan strategi komunikasi publik pemerintah yang lebih terintegrasi, responsif, dan berkelanjutan. Selain itu, rekomendasi forum diharapkan mampu mendukung penguatan reputasi pemerintah dan bangsa melalui komunikasi publik yang konstruktif dan berbasis nilai-nilai Pancasila.

Kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat keselarasan narasi nasional, meningkatkan sinergi komunikasi antarpemangku kepentingan, serta mendorong optimalisasi pemanfaatan media digital dalam penyampaian informasi publik kepada masyarakat.

Dengan terselenggaranya Forum Komunikasi Publik Tahun 2026, diharapkan pengelolaan komunikasi publik pemerintah ke depan semakin profesional, transparan, kredibel, dan mampu menjawab tantangan perkembangan informasi di era digital secara efektif.

Demikian laporan kegiatan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sekaligus dokumentasi resmi pelaksanaan Forum Komunikasi Publik Tahun 2026. Diharapkan laporan ini dapat menjadi referensi dan bahan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan komunikasi publik di masa mendatang.

































BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
SEKRETARIAT UTAMA
BIRO FASILITASI PIMPINAN, HUBUNGAN MASYARAKAT,
DAN ADMINISTRASI

Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta 10110 Telepon (021) 3505200
Situs Web: <https://bpip.go.id> Alamat Surel: persuratan@bpip.go.id

SURAT TUGAS

Nomor 244/HM/05/2026/SU.04

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan dukungan layanan kehumasan Kegiatan Forum Komunikasi Publik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dipandang perlu menugaskan pejabat/pegawai guna melaksanakan kegiatan dimaksud.

Dasar : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2026 Nomor DIPA-122.01.0/2026 tanggal 32 Januari 2026;

Memberi Tugas:

Untuk : 1. melaksanakan dan mengikuti secara aktif kegiatan Forum Komunikasi Publik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada tanggal 18 s.d. 21 Mei 2026 di Kota Batam, Kepulauan Riau;
2. melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada POK DIPA Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2026 dengan kode akun 122.01.WA.6925.EBA.958.051.A.524119 (Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota).

Jakarta, 11 Mei 2026

Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan,
Dukungan Masyarakat, dan
Administrasi,



Dr. Mahnan Marbawi, M.A.

Tembusan:

1. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia; dan
2. Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan Manajemen.

Lampiran Surat Tugas
Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan,
Hubungan Masyarakat, dan
Administrasi

Nomor : 244/HM/05/2026/
SU.04

Tanggal : 11 Mei 2026

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG MENGIKUTI KEGIATAN

1. Dr. Tonny Agung Arifianto (Sekretaris Utama);
2. Dr. Mahnan Marbawi, M.A.Pembina (Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi);
3. Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kemenkomdigi RI;
4. Deputy Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah Badan Komunikasi Pemerintah RI;
5. Rofi Uddarojat (Narasumber Public Policy and Government Relations TikTok Indonesia);
6. Narasumber Amsakar Achmad (Walikota Batam)
7. Fungsional Ahli Madya Kemenkomdigi RI;
8. Yoga Nathasa Amin (Kepala Bagian Hubungan Masyarakat);
9. Indra Wiguna (Kepala Subbagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat);
10. Rizki Amri (Kepala Subbagian Layanan Pengadaan);
11. Ardhan Irfan (Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama);
12. Ranggi Thomas Harahap (Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi);
13. M. Hilmie Azizi (Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama);
14. Hengki Saepul Anwar (Penelaah Teknis Kebijakan);
15. Dwi Maharani (Penelaah Teknis Kebijakan);
16. Enjang Rojali (Penata Layanan Operasional);
17. Boy Mardo (Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama);
18. Yudi Priadi Wibowo (Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama);
19. Kartini (Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama);
20. Esra Juliana S. (Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama);
21. Ferrizky (Staf Pengadaan);
22. Faiz Alfifakhri (PPNPN Humas);
23. Staf Kemenkomdigi RI;
24. Peserta BAKOHUMAS 1;
25. Peserta BAKOHUMAS 2;
26. Peserta BAKOHUMAS 3;
27. Peserta BAKOHUMAS 4;
28. Peserta BAKOHUMAS 5;
29. Peserta BAKOHUMAS 6;
30. Peserta BAKOHUMAS 7;
31. Peserta BAKOHUMAS 8;

32. Peserta BAKOHUMAS 9;
33. Peserta BAKOHUMAS 10;
34. Peserta BAKOHUMAS 11;
35. Peserta BAKOHUMAS 12;
36. Peserta BAKOHUMAS 13;
37. Peserta BAKOHUMAS 14;
38. Peserta BAKOHUMAS 15;
39. Peserta BAKOHUMAS 16;
40. Peserta BAKOHUMAS 17;
41. Peserta BAKOHUMAS 18;
42. Peserta BAKOHUMAS 19;
43. Peserta BAKOHUMAS 20;
44. Peserta BAKOHUMAS 21;
45. Peserta BAKOHUMAS 22;
46. Peserta BAKOHUMAS 23;
47. Peserta BAKOHUMAS 24;
48. Peserta BAKOHUMAS 25;
49. Peserta BAKOHUMAS 26;
50. Peserta BAKOHUMAS 27;
51. Peserta BAKOHUMAS 28;
52. Peserta BAKOHUMAS 29;
53. Peserta BAKOHUMAS 30;
54. Peserta BAKOHUMAS 31;
55. Peserta BAKOHUMAS 32;
56. Peserta BAKOHUMAS 33;
57. Peserta BAKOHUMAS 34;
58. Peserta BAKOHUMAS 35;
59. Peserta BAKOHUMAS 36;
60. Peserta BAKOHUMAS 37;
61. Peserta BAKOHUMAS 38;
62. Peserta BAKOHUMAS 39; dan
63. Peserta BAKOHUMAS 40.

Jakarta, 11 Mei 2026
Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan,
Dukungan Masyarakat, dan
Administrasi,



Dr. Mahnan Marbawi, M.A.

**BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
SEKRETARIAT UTAMA**

NOTA DINAS

Nomor 320/HM/05/2026/SU.04

Yth. : 1. Sekretaris Utama selaku Kuasa Pengguna Anggaran; dan
2. Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan Manajemen.
Dari : Plh. Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan
Administrasi
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan izin pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Publik
Tahun 2026 bertema "Strategi Bangun Narasi, Kuatkan Reputasi
Negeri"
Tanggal : 5 Mei 2026

Dengan hormat,

1. Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi akan melaksanakan kegiatan Forum Komunikasi Publik Tahun 2026 bertema "Strategi Bangun Narasi, Kuatkan Reputasi Negeri pada tanggal 18 s.d. 21 Mei 2026 di Kota Batam, Kepulauan Riau;
2. Mohon dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dimaksud, dengan menggunakan Bagan Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BA.122), dengan menggunakan kode akun mata anggaran:
 - a. 122.01.WA.6925.EBA.958.051.A.524119 (Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota) sebesar Rp209.947.000,- (Dua ratus sembilan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. 122.01.WA.6925.EBA.032.052.B.522151 (Belanja Jasa Profesi) sebesar Rp19.200.000,- (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah); dan
 - c. 122.01.WA.6925.EBA.032.052.B.521211 (Belanja Bahan) sebesar Rp21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah).

Atas persetujuan dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Yoga Natasha Amin

Disetujui,



Tonny Agung Arifianto



Rizki Amri

Lampiran I Nota Dinas
Plh. Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan,
Hubungan Masyarakat, dan Administrasi
Nomor : 320/HM/05/2026/SU.04
Tanggal : 5 Mei 2026



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) *TERM OF REFERENCE (TOR)*

KEGIATAN FORUM KOMUNIKASI PUBLIK TAHUN 2026 BERTEMA “STRATEGI BANGUN NARASI, KUATKAN REPUTASI NEGERI” PADA TANGGAL 18 S.D. 21 MEI 2026 DI KOTA BATAM, KEPULAUAN RIAU

Ruang Lingkup Dokumen Anggaran:

Program	: Dukungan Manajemen
Sasaran Program	: Terwujudnya Forum Komunikasi Publik Tahun 2026 bertema “Strategi Bangun Narasi, Kuatkan Reputasi Negeri”
Kegiatan	: Forum Komunikasi Publik Tahun 2026 bertema “Strategi Bangun Narasi, Kuatkan Reputasi Negeri pada tanggal 18 s.d. 21 Mei 2026 di Kota Batam, Kepulauan Riau
Sasaran Kegiatan	: Terlaksananya Forum Komunikasi Publik Tahun 2026 bertema “Strategi Bangun Narasi, Kuatkan Reputasi Negeri”
Keluaran (<i>Output</i>)	: Dokumen Laporan
Satuan Keluaran (<i>Output</i>)	: Laporan Pelaksanaan Tugas
Kode MAK	: 122.01.WA.6925.EBA.958.051.A.524119 122.01.WA.6925.EBA.032.052.B.522151 122.01.WA.6925.EBA.032.052.B.521211

TAHUN ANGGARAN 2026

A. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
8. Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Renstra BPIP Tahun 2020-2024;
9. Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP;
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2026 Nomor DIPA-122.01.0/2026 tanggal 32 Januari 2026

b. Gambaran Umum

Pemerintah Republik Indonesia terus berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024. Salah satu prioritas pembangunan nasional adalah penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan melalui revolusi mental, yang menjadi pilar penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berintegritas, berdaya saing, dan berjiwa nasionalis.

Dalam mewujudkan prioritas tersebut, peran komunikasi publik menjadi sangat vital. Komunikasi publik berfungsi tidak hanya sebagai media penyebaran informasi program dan kebijakan pemerintah, tetapi juga sebagai instrumen penguatan jati diri bangsa, pengendalian opini, edukasi masyarakat, serta pembangunan citra lembaga negara di tengah tantangan era digital dan keterbukaan informasi.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) merupakan lembaga negara nonkementerian yang bertugas melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan kepada seluruh elemen bangsa. Dalam menjalankan tugas tersebut, BPIP memerlukan dukungan layanan kehumasan yang handal, terintegrasi, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Salah satu unit kerja yang memainkan peran strategis dalam aspek ini adalah Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP, Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi bertugas menyelenggarakan fasilitasi kerumahtanggaan dan keprotokolan pimpinan, pengelolaan hubungan masyarakat, penanganan pengaduan masyarakat, serta pelayanan administrasi. Unit kerja ini menjadi tulang punggung dalam memastikan komunikasi kelembagaan BPIP berjalan secara lancar, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.

Bagian Hubungan Masyarakat, sebagai bagian dari struktur biro tersebut, memiliki mandat penting dalam menyelenggarakan komunikasi Masyar BPIP. Fungsi kehumasan di era digital saat ini bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun dialog, merespons dinamika Masyar, serta menjaga kepercayaan Masyarakat terhadap Masyara negara. Dalam konteks itu, kehumasan BPIP dituntut mampu menyampaikan pesan-pesan ideologis secara kreatif dan komunikatif, sekaligus menjaga identitas dan integritas Masyara di mata Masyar nasional maupun internasional.

Tugas dan fungsi Bagian Hubungan Masyarakat mencakup:

- a. pelaksanaan hubungan Masyarakat;
- b. monitoring dan analisis pemberitaan media dan opini Masyar;
- c. pengelolaan media center dan konten media elektronik resmi BPIP;
- d. pelaksanaan peliputan dan publikasi kegiatan pimpinan dan kelembagaan;
- e. serta pengelolaan pengaduan Masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, fungsi-fungsi tersebut mengharuskan adanya sinergi lintas bidang, baik secara internal antarunit di lingkungan BPIP maupun secara eksternal dengan media massa, lembaga pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat umum. Pelayanan hubungan masyarakat yang baik menjadi wajah lembaga di ruang publik, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, berbasis data, dan responsif terhadap dinamika sosial serta perkembangan teknologi komunikasi.

Seiring dengan meningkatnya dinamika komunikasi publik di era digital, kebutuhan akan pengelolaan narasi yang strategis dan penguatan reputasi kelembagaan menjadi semakin penting. Peran kehumasan tidak lagi terbatas pada fungsi publikasi, tetapi telah berkembang menjadi garda terdepan dalam membangun persepsi publik, menjaga konsistensi pesan, serta memastikan penyebaran informasi yang akurat, cepat, dan kredibel kepada masyarakat.

Dalam konteks tersebut, penyelenggaraan Forum Komunikasi Publik menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi komunikasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Forum ini tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga wadah kolaborasi dalam merumuskan strategi komunikasi yang adaptif, inovatif, dan relevan dengan tantangan zaman, khususnya dalam membangun narasi positif dan memperkuat reputasi bangsa di ruang publik.

Pelaksanaan kegiatan ini juga diarahkan untuk menghasilkan pertukaran gagasan, praktik baik, serta rekomendasi kebijakan yang aplikatif dalam pengelolaan komunikasi publik. Selain itu, kegiatan ini akan didukung oleh dokumentasi dan publikasi yang terencana, guna memastikan setiap substansi yang dihasilkan dapat tersampaikan secara luas melalui berbagai kanal komunikasi, baik media konvensional maupun digital.

Dalam rangka itu, akan dilaksanakan kegiatan **Forum Komunikasi Publik Tahun 2026** bertema “**Strategi Bangun Narasi, Kuatkan Reputasi Negeri**” pada tanggal 18 s.d. 21 Mei 2026 di Kota Batam, Kepulauan Riau. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas komunikasi publik, membangun keselarasan narasi nasional, serta meningkatkan citra dan reputasi Indonesia secara berkelanjutan melalui pengelolaan komunikasi yang profesional, transparan, dan berintegritas.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk menyelenggarakan Forum Komunikasi Publik Tahun 2026 sebagai wadah strategis dalam memperkuat sinergi komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan. Forum ini diarahkan untuk membangun keselarasan narasi publik yang kuat, terpadu, dan berorientasi pada penguatan reputasi bangsa di tengah dinamika informasi di era digital.

Selain itu, kegiatan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran kehumasan pemerintah sebagai aktor utama dalam mengelola komunikasi publik yang efektif, adaptif, dan berbasis strategi. Melalui forum ini, diharapkan terbangun pemahaman bersama mengenai pentingnya pengelolaan narasi, penguatan citra positif, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi publik.

Lebih lanjut, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mendorong pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik baik antar peserta, serta menghasilkan rumusan strategi komunikasi publik yang aplikatif, inovatif, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan nasional dan penguatan reputasi Indonesia di tingkat global.

2. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan ini antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman dan kapasitas peserta dalam menyusun serta mengelola narasi komunikasi publik yang strategis dan efektif.
2. Mewujudkan keselarasan narasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung kebijakan dan program nasional.
3. Menghasilkan rekomendasi strategis sebagai pedoman dalam pengelolaan komunikasi publik dan penguatan reputasi bangsa.

4. Mendorong pemanfaatan media digital dan platform komunikasi secara optimal dalam menyebarkan informasi yang positif dan kredibel.
5. Memperkuat citra dan reputasi lembaga serta pemerintah melalui komunikasi publik yang terencana, konsisten, dan berkelanjutan.
6. Membangun jejaring dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung efektivitas komunikasi publik di Indonesia.

C. SUMBER DANA

Kegiatan Forum Komunikasi Publik Tahun 2026 bertema “Strategi Bangun Narasi, Kuatkan Reputasi Negeri” pada tanggal 18 s.d. 21 Mei 2026 di Kota Batam, Kepulauan Riau dengan menggunakan Kode Mata Anggaran 122.01.WA.6925.EBA.958.051.A.524119 (Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota) sebesar Rp209.947.000,- (Dua ratus sembilan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah); 122.01.WA.6925.EBA.032.052.B.522151 (Belanja Jasa Profesi) sebesar Rp19.200.000,- (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah); dan 122.01.WA.6925.EBA.032.052.B.521211 (Belanja Bahan) sebesar Rp21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah).

D. TAHAPAN KEGIATAN

Tahapan Kegiatan Forum Komunikasi Publik Tahun 2026 bertema “Strategi Bangun Narasi, Kuatkan Reputasi Negeri” pada tanggal 18 s.d. 21 Mei 2026 di Kota Batam, Kepulauan Riau dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Melakukan penyusunan konsep kegiatan secara komprehensif yang meliputi penentuan tema, tujuan, sasaran peserta, agenda kegiatan, serta penyiapan dokumen perencanaan seperti kerangka acuan kerja (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan jadwal pelaksanaan. Pada tahap ini juga dilakukan penentuan narasumber, moderator, serta desain alur kegiatan yang selaras dengan penguatan narasi dan reputasi bangsa.

2. Tahap Koordinasi Teknis

Melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, baik internal maupun eksternal, meliputi panitia pelaksana, narasumber, moderator, serta stakeholder lainnya. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan kesiapan teknis dan substansi kegiatan, termasuk finalisasi rundown acara, pembagian tugas, serta sinkronisasi materi yang akan disampaikan.

3. Tahap Persiapan Teknis dan Administratif

Melakukan persiapan teknis pelaksanaan kegiatan yang mencakup penyediaan tempat kegiatan, akomodasi peserta dan narasumber, konsumsi, transportasi, serta perlengkapan kegiatan. Selain itu, dilakukan juga persiapan administrasi berupa penyusunan dan distribusi undangan, konfirmasi kehadiran peserta, serta penyiapan bahan pendukung kegiatan.

4. Tahap Pra-Pelaksanaan (Hari Kedatangan)

Melaksanakan kegiatan awal pada tanggal 18 Mei 2026 yang meliputi keberangkatan peserta dan panitia menuju Kota Batam serta proses check-in

hotel. Tahap ini bertujuan untuk memastikan kesiapan seluruh pihak sebelum memasuki kegiatan inti.

5. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Melaksanakan kegiatan inti pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 sesuai dengan rundown yang telah ditetapkan, meliputi:

- Registrasi dan pembukaan kegiatan
- Penyampaian sambutan dan pembukaan resmi
- Diskusi panel dan paparan narasumber
- Sesi interaktif, workshop, dan simulasi/studi kasus
- Networking session dan sharing praktik baik
- Penyusunan dan penyampaian rekomendasi hasil forum
- Penutupan kegiatan

Tahap ini merupakan inti pelaksanaan forum yang berfokus pada pertukaran gagasan, penguatan kapasitas, serta penyusunan strategi komunikasi publik.

6. Tahap Pasca Pelaksanaan

Melaksanakan kegiatan penutup pada tanggal 21 Mei 2026 yang meliputi proses check-out hotel dan kepulangan peserta ke daerah masing-masing. Tahap ini menandai berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan forum.

7. Tahap Evaluasi dan Pelaporan

Melakukan evaluasi terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan, baik dari aspek substansi, teknis, maupun partisipasi peserta. Evaluasi dilakukan melalui pengumpulan umpan balik peserta serta penilaian internal panitia sebagai bahan perbaikan ke depan.

Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara komprehensif yang memuat rangkaian kegiatan, hasil yang dicapai, serta rekomendasi forum. Laporan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sekaligus referensi untuk pengembangan kegiatan serupa di masa mendatang

E. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. *Output*

1. Terselenggaranya Kegiatan Forum Komunikasi Publik Tahun 2026 secara lancar, tertib, dan sesuai dengan rencana.
2. Terlaksananya seluruh rangkaian kegiatan forum, meliputi pembukaan, diskusi panel, workshop, simulasi, hingga penutupan.
3. Tersusunnya rumusan rekomendasi strategis terkait pengelolaan narasi komunikasi publik dan penguatan reputasi negeri.
4. Terbangunnya forum komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait.
5. Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi dan dokumentasi kegiatan.

2. *Outcome*

1. Meningkatnya pemahaman dan kapasitas peserta dalam membangun narasi komunikasi publik yang strategis, efektif, dan adaptif di era digital.
2. Terwujudnya keselarasan narasi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung kebijakan dan program nasional.
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan komunikasi publik yang berorientasi pada penguatan citra dan reputasi bangsa.
4. Terbangunnya kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendukung komunikasi publik yang terpadu dan berkelanjutan.
5. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah melalui penyampaian informasi yang kredibel, konsisten, dan konstruktif.

F. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Forum Komunikasi Publik Tahun 2026 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan secara terarah, efektif, dan akuntabel. Kegiatan ini merupakan bagian penting dalam upaya memperkuat pengelolaan komunikasi publik melalui pembangunan narasi yang strategis serta penguatan reputasi bangsa di tengah dinamika informasi yang semakin kompleks.

Pelaksanaan forum ini diharapkan mampu menjadi wadah sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi komunikasi publik yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang aplikatif serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi publik.

Dengan demikian, melalui pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan tercipta keselarasan narasi nasional yang kuat serta peningkatan citra dan reputasi Indonesia di tingkat nasional maupun global. Ke depan, pengelolaan komunikasi publik diharapkan semakin profesional, responsif, dan mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi informasi serta kebutuhan masyarakat akan informasi yang transparan dan kredibel.

Penanggung Jawab Kegiatan,



Yoga Natasha Amin

Lampiran II Nota Dinas
Plh. Kepala Biro Fasilitas Pimpinan,
Hubungan Masyarakat, dan Administrasi
Nomor : 320/HM/05/2026/SU.04
Tanggal : 5 Mei 2026

**RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)
FORUM KOMUNIKASI PUBLIK TAHUN 2026 BERTEMA
“STRATEGI BANGUN NARASI, KUATKAN REPUTASI NEGERI”
PADA TANGGAL 18 S.D. 21 MEI 2026 DI KOTA BATAM, KEPULAUAN RIAU**

Mata Anggaran 122.01.WA.6925.EBA.958.051.A.524119

URAIAN	VOL	STN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
JUMLAH TOTAL				209.947.000
BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA				
<i>Room Only</i>				
-Eselon I: 2 Orang x 1 Hari x 1 Keg	2	OK	6.177.000	12.354.000
-Eselon II: 3 Orang x 1 Hari x 1 Keg	3	OK	2.481.000	7.443.000
-Eselon III: 2 Orang x 1 Hari x 1 Keg	2	OK	1.388.000	2.776.000
-Eselon IV kebawah: 14 Orang x 1 Hari x 1 Keg	14	OK	792.000	11.088.000
<i>Fullboard</i>				
-Eselon I dan 2: 2 Orang x 1 Hari x 1 Keg	2	OK	1.170.000	2.340.000
-Eselon I dan 2: 3 Orang x 2 Hari x 1 Keg	6	OK	1.170.000	7.020.000
-Eselon III dan IV: 15 Orang x 2 Hari x 1 Keg	30	OK	807.000	24.210.000
-Eselon III dan IV: 1 Orang x 1 Hari x 1 Keg	1	OK	807.000	807.000
<i>Fullday</i>				
-Eselon I dan 2: 1 Orang x 1 Hari x 1 Keg	1	OK	531.000	531.000
-Eselon III dan IV: 40 Orang x 2 Hari x 1 Keg	80	OK	321.000	25.680.000
<i>Uang Harian</i>				
-UH Biasa : 17 Orang x 2 Hari x 1 Keg	34	OH	370.000	12.580.000
-UH Biasa : 4 Orang x 1 Hari x 1 Keg	4	OH	370.000	1.480.000
-UH Fullboard: 1 Orang x 1 Hari x 1 Keg	1	OH	130.000	130.000
-UH Fullboard: 21 Orang x 1 Hari x 1 Keg	21	OH	130.000	5.460.000
<i>DPR</i>				
-Taksi Jakarta PP: 21 Orang x 1 Keg	1	OK	500.000	10.500.000
-Taksi Betam PP: 21 Orang x 1 Keg	1	OK	318.000	6.678.000
- Transportasi Lokal: 1 Orang x 1 Keg	1	OK	170.000	170.000
<i>Tiket Pesawat</i>				
-Tiket Pesawat Bisnis PP: 2 Orang x 1 Keg	1	OK	8.000.000	16.000.000

URAIAN	VOL	STN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
-Tiket Pesawat PP: 19 Orang x 1 Keg	1	OK	3.300.000	62.700.000

Mata Anggaran 122.01.WA.6925.EBA.032.052.B.522151

URAIAN	VOL	STN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
JUMLAH TOTAL				19.200.000
BELANJA JASA PROFESI				
Honorarium Narasumber dan Moderator				
-Setara Menteri: 1 Orang x 3 Jam x 1 Keg	3	OJ	1.700.000	5.100.000
-Setara Eselon I : 1 Orang x 3 Jam x 1 Keg	3	OJ	1.400.000	4.200.000
-Setara Eselon II: 3 Orang x 3 Jam x 1 Keg	9	OJ	1.000.000	9.000.000
-Moderator: 1 Orang x 1 Keg	1	OK	900.000	900.000

Mata Anggaran 122.01.WA.6925.EBA.032.052.B.521211

URAIAN	VOL	STN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
JUMLAH TOTAL				21.000.000
BELANJA BAHAN				
<i>Seminar Kit</i>				
-Seminar kit: 70 Orang x 1 Keg	70	OK	300.000	21.000.000

Penanggung Jawab Kegiatan,



Yoga Natasha Amin

Lampiran III Nota Dinas
Plh. Kepala Biro Fasilitas Pimpinan,
Hubungan Masyarakat, dan Administrasi
Nomor : 320/HM/05/2026/SU.04
Tanggal : 5 Mei 2026

SUSUNAN ACARA (*RUNDOWN*)
FORUM KOMUNIKASI PUBLIK TAHUN 2026 BERTEMA
“STRATEGI BANGUN NARASI, KUATKAN REPUTASI NEGERI”
PADA TANGGAL 18 S.D. 21 MEI 2026 DI KOTA BATAM, KEPULAUAN RIAU

No.	Waktu (WIB)	Kegiatan	Keterangan
Senin, 18 Mei 2026			
1	Keberangkatan (Perjalanan menuju Kota Batam, Kepulauan Riau)		
2	Check-in hotel		
Selasa, 19 Mei 2026			
1	07.30 – 08.00	Registrasi peserta, verifikasi undangan, pembagian ID card & kit	
2	08.00 – 08.05	Peserta memasuki ruangan, pemutaran video teaser & backsound	
3	08.05 – 08.10	Pembukaan oleh MC	
4	08.10 – 08.15	Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza	
5	08.15 – 08.20	Doa	
6	08.20 – 08.35	Sambutan Sekretaris Utama BPIP sekaligus membuka acara	
7	08.35 – 11.50	Narasumber: Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kemenkomdigi Moderator: Badan Komunikasi Pemerintah RI	
8	11.50 – 12.00	Penyerahan plakat & foto bersama	
9	12.00 – 13.00	ISHOMA	
10	13.00 – 13.05	Pengantar moderator & pengenalan narasumber	
11	13.05 – 16.05	Diskusi Panel Narasumber: 1. Walikota Batam “Strategi Branding Daerah dan Penguatan Reputasi Kota Batam” 2. Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah Badan Komunikasi Pemerintah RI “Pancasila sebagai <i>Soul of Branding</i> . Mengawal Narasi Tunggal di Ruang Digital” 3. <i>Public Policy and Government Relations</i> TikTok Indonesia “ <i>The Power of Short-Form Video</i> : Orkestrasi Narasi Positif dan Manajemen Reputasi Bangsa di Era Digital”	

No.	Waktu (WIB)	Kegiatan	Keterangan
		Moderator: Badan Komunikasi Pemerintah RI	
12	16.05 – 16.35	Coffee Break	
13	16.35 – 18.00	Diskusi panel & tanya jawab	
14	18.00 – 19.00	Istirahat, salat, makan (ISHOMA)	
15	19.00 – 20.00	Ice breaking ringan / energizer Sharing praktik baik komunikasi publik	
16	20.00 – 21.00	Penutup sesi & kesimpulan moderator	
Rabu, 20 Mei 2026			
1	07.00 – 07.30	Re-registrasi & coffee morning	
2	07.30 – 08.00	Networking ringan & recap hari pertama (video highlight)	
3	08.00 – 08.05	Pengkondisian peserta	
4	08.05 – 08.10	Pembukaan hari kedua oleh MC	
5	08.10 – 11.10	Komunikasi Publik Kelas Dunia: Belajar dari Praktik Diplomasi Modern Narasumber: Dino Patti Djalal (Wakil Menteri RI Luar Negeri Periode Tahun 2014, Pakar Diplomasi Publik) Moderator: Badan Komunikasi Pemerintah RI	
6	11.10 – 12.00	Diskusi & tanya jawab	
7	12.00 – 13.00	Istirahat, salat, makan (ISHOMA)	
8	13.00 – 13.10	Ice breaking / energizer	
9	13.10 – 13.20	Pengantar sesi studi kasus	
10	13.20 – 14.20	Simulasi krisis komunikasi (kelompok)	
11	14.20 – 15.00	Presentasi hasil simulasi	
12	15.00 – 15.30	Ice breaking / kuis	
13	15.30 – 16.30	Penyusunan rekomendasi forum	
14	16.30 – 17.15	Finalisasi & penyepakatan hasil	
15	17.15 – 17.30	Penyerahan hasil ke panitia	
16	17.30 – 19.00	Istirahat, salat, makan (ISHOMA)	
17	19.00 – 19.20	Penyampaian hasil forum	
18	19.20 – 19.30	Sambutan penutup	
19	19.30 – 19.40	Menyanyikan lagu Bagimu Negeri	
20	19.40 – 19.50	Dokumentasi & foto bersama	
21	19.50 – 20.00	Closing oleh MC	

No.	Waktu (WIB)	Kegiatan	Keterangan
Kamis, 21 Mei 2026			
1		Check-out hotel	
2		Kepulangan (Perjalanan kembali menuju kota asal)	

Penanggung Jawab Kegiatan,



Yoga Natasha Amin